

**Media masih Pilar Demokrasi?  
(Jurnalisme dan Demokrasi di Bingkai Pemberitaan Pernyataan Sikap Civitas  
Akademika Jawa Timur tentang Pemilu 2024)**

**Theresia Intan Putri Hartiana<sup>1</sup>, Putra Aditya Lapalelo<sup>2</sup>, dan Nanang Krisdinanto<sup>3\*</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi kecurigaan atas perubahan rutinitas dan praktik kerja jurnalistik sebagai akibat dari perubahan teknologi, disrupsi informasi, kemerosotan ekonomi, dan praktik politik-ekonomi media, yang mungkin mempengaruhi peran media sebagai alat kontrol demokrasi. Penelitian ini ingin melihat apakah faktor-faktor pelemahan kerja jurnalistik tersebut mempengaruhi kualitas isi berita media saat proses peliputan berita yang ada hubungannya dengan demokrasi dan kepentingan rakyat. Apa lagi selama ini perspektif jurnalistik menekankan bahwa alat pembingkai berita milik media harus dijalankan guna tujuan kepentingan umum dan menjaga pilar demokrasi. Mengambil kasus pemberitaan “Pernyataan Sikap Civitas Akademik Jawa Timur tentang Pemilu 2024 oleh 3 portal berita, Jawa Pos, Kompas, dan Detik”, dan menggunakan model bingkai Entman, penelitian ini diharapkan bisa memberi gambaran apakah media masih menjalankan perannya sebagai alat kontrol demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga media masih meletakkan komponen pembingkai masing-masing untuk menunjang proses demokrasi, melalui bingkai demokrasi jujur dan adil. Namun peran kontrol demokrasi ini masih sangat berkaitan erat dengan praktik ekonomi-politik media.

**Kata-kata Kunci:** Jurnalisme; Kontrol Sosial; Demokrasi; Bingkai Berita; Rutinitas Media

***Media is still a Pillar of Democracy?  
(Journalism and Democracy in the Frame of the News ‘Pernyataan Sikap  
Civitas Akademika Jawa Timur’)***

**ABSTRACT**

*This research is motivated by the suspicion that changes in journalistic work routines and practices as a result of technological change, information disruption, economic downturn, and media political-economic practices, which may affect the role of the media as a democratic control tool. This research wants to see whether these factors of weakening journalistic work affect the quality of media news content during the process of covering news that has to do with democracy and the interests of the people. Journalistic perspectives have emphasised that the media's news framing tools must be implemented for the purpose of public interest and maintaining the pillars of democracy. Taking the case of the news coverage of the ‘East Java Academic Community Statement about Election by 3 news portals, Jawa Pos, Kompas, and Detik’, and using Entman's framing model, it is hoped that it can provide an overview of whether the media is still carrying out its role as a democratic control tool. The results found that the three media still put their respective framing components to support the democratic process, through the frame of honest and fair democracy. However, the role of democratic control is still closely related to the political-economic practices of the media.*

**Keywords:** Journalism; Social Control; Democracy; News Frames; Media Routines

---

\*Korespondensi: Dr. Nanang Krisdinanto. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Jl. Dinoyo 42-44, Keputran, Surabaya, Email: nangkris@ukwms.ac.id

## PENDAHULUAN

Kontestasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (2024) terasa memanas dan riuh. Dialektika informasi politik di masyarakat, makin bergejolak. Gelombang panas ini, tak luput dari sikap kritis beberapa pihak terhadap pelaksanaan Pemilu 2024. Pemilu 2024 dipandang mencederai nilai – nilai demokrasi dan proses kontestasi politik berlangsung dalam situasi yang adil. Keprihatinan agar Pemilu 2024 tidak mengalami kemunduran dan mengharap Pemilu damai lantas disuarakan, salah satunya datang dari kalangan akademisi. Gelombang petisi dari sejumlah Perguruan Tinggi dan akademisi bermunculan menyuarakan kegelisahan terhadap demokrasi yang dianggap mulai menyimpang.

Diawali dengan akademisi dari Universitas Gajah Mada lewat petisinya “Petisi Bulaksumur”, kemudian berbagai kampus seperti Universitas Indonesia, Universitas Andalas, dan disusul beberapa kampus lainnya. Begitu pula seruan agar Pemilu 2024 berjalan lebih baik, muncul dari akademisi dan perguruan tinggi di Jawa Timur. Beberapa diantaranya Seruan Kebangsaan dari Kampus Merah Putih di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag), Pernyataan sikap dari Universitas Airlangga, Universitas Jember.

Munculnya beragam seruan situasi Pemilu 2024 di Jawa Timur ini menjadi gambaran bahwa Indonesia sedang sedang tidak baik-baik saja. Terlebih, pengamat politik menilai bahwa wilayah Jawa Timur merupakan barometer dalam pemilihan umum Nasional. (Vicki Febrianto 2023). Hal ini bisa diartikan, bahwa situasi Pemilu 2024 di Jawa Timur yang juga ramai, bisa dikatakan cerminan situasi Pemilu 2024 di Indonesia yang juga ramai. Pernyataan akademisi dari berbagai perguruan tinggi yang mendorong adanya pemilu damai di Jawa Timut, tentunya tidak lepas dari liputan media.



Gambar 1. Pemberitaan di kompas.com dan detik.com terkait pernyataan sikap Pemilu 2024

Sumber: (Bagus Supriadi 2024) dan (Mulyono 2024)

Seperti terlihat dalam judul gambar di atas, media menampilkan pernyataan sikap Universitas Jember terkait Pemilu dalam sudut pandang berbeda. Kompas melihat bahwa pernyataan sikap mengarah untuk menghentikan politisasi kebijakan yang dilakukan Jokowi. Begitu pula dengan detik.com langsung mengarah pada Pemilu 2024 dipandang sebagai bagian politik dinasti yang dilakukan Jokowi. Merujuk pada berita di atas, media seringkali secara tidak langsung mengkonstruksi realitas melalui berita yang ditulisnya. Bahasa yang disajikan media merupakan gambaran realitas yang dikonstruksi dan ditampilkan. Penggunaan kata ataupun foto menjadikan memberikan makna atas realitas tersebut.

(Rusli, Ahdan, and Idris 2022).

Produk pemberitaan yang ditampilkan menjadi alat menyampaikan kepentingan ideologi dari masing – masing media. framing berita menjadi arena simbolik pihak – pihak yang berkepentingan dalam isu tersebut (Wardani, Suprayitno, and Nadya Wahyuningratna 2023). Peran media dalam pemberitaan Pemilu sangat diperlukan dalam peningkatan demokrasi. Hal ini yang diharapkan mampu mendorong partisipasi publik dalam mencapai konsolidasi demokrasi, yang terwujud dalam partisipasi aktif Pemilu. Sehingga transparansi dan akuntabilitas akan dapat terwujud dengan menghindarkan pada kecurangan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat (Hutomo 2023).

Media menjadi alat kontrol sosial dalam penyelenggaraan Pemilu dalam memberikan informasi kepada publik. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan dari tokoh politik dalam Pemilu. Idealnya media dan wartawan harus mampus menjaga independen untuk menjamin pemberitaan yang lebih objektif. (Prasetyo et al. 2023), Untuk menjalankan fungsinya sebagai pilar ke-empat, (fourth estate) demokrasi, pers punya kewajiban menjaga terselenggaranya pemilu yang sehat.

Namun sayangnya, perkembangan media massa di Indonesia telah mengalami perubahan dari apa yang disebut media perjuangan yang penuh nilai idealis menjadi media komersial yang mengedepankan nilai komersial (Wibawa 2020). Tudingan keberpihakan media, menjadi semakin nyata dengan masuknya para pemilik media dalam dunia politik Indonesia. Sebut saja Surya Paloh sebagai pimpinan Media Group, yang memiliki jaringan Media Indonesia, Lampung Post, Stasiun Televisi Metro TV, yang sekaligus Ketua Umum Partai Nasional Demokrat. Kepentingan ekonomi politis menjadi pengikis netralitas media massa dalam menyampaikan berita.

Sejalan dengan pemikiran Herman dan Chomsky (1988) bahwa kepentingan ekonomi dan politik akan condong untuk menjadi fungsi utama daripada fungsi sosial dan publik. Sebagai sumber pesan utama yang dapat mempengaruhi pemikiran banyak orang, media memiliki kekuatan untuk menentukan proses pembuatan nilai dalam masyarakat. Oleh Castell, nilai dalam kenyataannya dipandang sebagai sebuah ekspresi kekuasaan: media juga memegang kuasa dan oleh sebab itu sungguh menentukan apa yang dianggap (ber)nilai (CIPG 2015).

Penelitian yang menyorot mengenai fungsi media massa sebagai penjaga pilar demokrasi telah dilakukan. Slamet (2016) memaparkan bahwa kedudukan media sebagai penjaga pilar demokrasi dipandang telah melakukan kebohongan publik dalam proses Pemilu, seperti pada Pemilu Presiden di Amerika dan Indonesia dengan memunculkan data manipulatif. Hal ini tidak terlepas media yang dikuasai pemilik modal (Slamet 2016). Lebih lanjut Hariyadi (2018) menyoroti bahwa fungsi media massa, dalam konteks ini MNC Grup dari sebuah nilai guna menjadi di panggung Pilpres 2019 telah menjadi kontestasi nilai tukar atau komodifikasi. Melalui politik kuasa media yang dimilikinya MNC Grup, telah terbukti meruntuhkan pilar demokrasi (Hariyadi 2018).

Hal inilah kemudian yang menjadi sorotan di beberapa penelitian bahwa fungsi keempat pilar demokrasi telah digeser oleh media sosial sebagai pilar kelima Demokrasi. Sumarkidjo (2013) menyatakan kontrol sosial tidak lagi menjadi monopoli utama pers seiring berkembangnya media baru (new media) dan media sosial. Media baru dan media sosial inilah yang pada akhirnya menjadikan pendorong mengangkat isu ketidakadilan (Sumarkidjo 2013). Selain itu Lestari (2018) melihat bahwa change.org sebagai media digital dapat digunakan sebagai medium untuk mengakomodir tindakan kolektif warga karena sifatnya

yang mudah diakses oleh siapapun dan kapanpun. Hal ini memberi kekuatan lebih yang tidak ditemui oleh media massa yang hanya bersifat satu arah (Lestari and Suranto 2018).

Penelitian kali ini ingin kembali menyoroti bagaimana fungsi media massa sebagai pilar keempat demokrasi tetap terjaga khususnya pada Pemilu 2024 dalam membingkai Pemberitaan Pernyataan Sikap Civitas Akademika Jawa Timur. Sehingga hasil dari temuan tersebut dapat dipaparkan apakah bingkai yang dihasilkan media karena dilatarbelakangi idealisme ekonomi politik, atau tujuan politis. Selanjutnya dapat terlihat media menjalankan perannya sebagai fungsi pilar demokrasi pada Pemilu 2024, sesuai dengan moralitas kerja jurnalistik, atau media.

## METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan analisis framing dengan model Entman, dengan pendekatan kualitatif. Subjek dalam pemberitaan ini adalah pemberitaan terkait pernyataan sikap akademi, Perguruan Tinggi di Jawa Timur yang dimuat dalam kompas.com, detik.com dan jawapos.com. Batas waktu yang digunakan pemberitaan pernyataan sikap akademisi pada media online selama kampanye Pemilu 2024, yakni November 2023 – 10 Februari 2024.

Tabel 1. Aspek Framing Entman

Aspek framing Etnman	Definisi
<i>Define problem</i>	Realitas dipandang sebagai masalah apa?
<i>Diagnose causes</i>	Komponen sebab akibat, suatu masalah terjadi dikarenakan sebab apa, dan siapa actor yang menyebabkan permasalahan itu terjadi.
<i>Make moral judgement</i>	Penilaian moral bekerja dalam penyusunan berita, nilai moral apa yang dipakai oleh media untuk mengukuhkan pandangan atau melegitimasi suatu tindakan
<i>Treatment recommendation</i>	Solusi yang ditawarkan media dalam mengatasi masalah yang sudah muncul.

Sumber : (Eriyanto 2013)

## HASIL PENELITIAN

### Pernyataan Sikap Universitas Tujuh Belas Agustus

Pernyataan sikap akademika Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) menjelang pemilu 2024 diliput oleh media Kompas, dan Detik. Dalam peristiwa pernyataan sikap Untag, Untag sebagai universitas menyatakan permasalahan menjelang pemilu 2024 adalah hasil dari praktik-praktik Intimidasi, Korupsi, Kolusi, Nepotisme, yang terjadi selama kampanye dan menjelang pelaksanaan pemilu, apalagi sejak peristiwa kontroversial MK menetapkan Gibran Gibran Rakabuming Raka. Untuk mencurigai keterlibatan pemerintah pusat dalam mengintervensi pelaksanaan pemilu dengan kekuasaan.

Peristiwa pernyataan sikap yang terjadi di kampus Untag ini, diberitakan oleh dua media Detik dan Kompas, keduanya menampilkan peristiwa pernyataan sikap itu apa adanya, dengan melihat define problem persoalan tersebut adalah akademisi menolak dinasti politik, penyebabnya atau diagnosa cause adalah pemilu berada dalam situasi hukum dan demokrasi tidak berjalan semestinya, dimana moral judgment sedikit berbeda dimana Detik mengedepankan moralitas bersama dalam menjaga demokrasi sedangkan

Kompas mendorong gerakan sosial terhadap pemerintah. Detik memberikan rekomendasi agar semua pihak menahan diri dan menjaga netralitas, termasuk pemerintah agar tidak abuse of power, sedangkan Kompas tidak memberikan rekomendasi, mungkin karena moral judgment yang dibuat Kompas juga bisa dianggap sebagai solusi dan rekomendasi menuju pemilu yang jujur dan adil. Lebih detail soal ini silahkan lihat tabel 2.

**Tabel 2. framing media terhadap pernyataan civitas akademika Universitas Tujuh Belas Agustus**

	DETIK (Devi 2024)	KOMPAS (Gupta 2024)	JAWAPOS
<i>Define Problems</i>	Universitas Tujuh Belas Agustus sebagai institusi akademik menolak dinasti politik	Universitas Tujuh Belas Agustus menolak politik dinasti dan intimidasi	Tida ada berita
<i>Diagnose Causes</i>	Ingin mendorong agar terwujudnya pemilu yang jujur dan adil. Karena politik dinasti memicu munculnya intimidasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme.	Pemilu 2024 dianggap keluar jalur demokrasi dan reformasi	
<i>Make Moral Judgment</i>	Presiden dan para pemimpin harus menempatkan kepentingan umum sebagai prioritas utama dibanding pribadi dan golongan	Seruan Kebangsaan	
<i>Treatment Recommendation</i>	Seluruh rakyat Indonesia untuk menolak praktik politik dinasti dan uang dalam pemilu. Sekaligus menyarankan kepada pemerintah untuk menjatuhkan sanksi tegas pada segala bentuk abuse of power.	-	
<i>Frame</i>	Penolakan Politik Dinasti untuk menghindari Intimidasi dan KKN	Penolakan Politik Dinasti Menyimpang dari Demokrasi	

Sumber : olahan peneliti

### Pernyataan sikap Universitas Jember

peristiwa pernyataan sikap oleh komunitas akademika juga dilakukan oleh universitas Jember, dalam pernyataan sikap yang dilakukan di kampus Universitas Jember (Unej), Unej, menerjemahkan pelaksanaan pemilu 2024 dalam situasi “memprihatinkan” karena intervensi oleh kekuasaan, yang dilabelkan sebagai dinasti politik, pernyataan sikap Unej mendorong pemerintah agar bersikap netral dan mendorong masyarakat mengawal jalannya pemilu 2024.

Peristiwa pernyataan sikap ini diliput oleh 3 media, Detik, Kompas dan jawapos, ketiganya membangun pembingkai terhadap peristiwa ini, dengan tahapan sebagai berikut define problem Detik mengarah pada semua pihak bertanggung jawab dalam proses terjadinya pemilu baik dari rakyat hingga pemerintah, disisi lain Kompas dan Jawa Pos menekankan define problem pada kecemasan dan kekhawatiran akademika pada pemilu 2024. Diagnosa cause atau kausalitas terjadinya masalah tampaknya sama diantara ketiganya bahwa dinasti politik mengambil peranan dalam munculnya masalah, baik detik yang menekankan masalah pemilu secara umum, maupun Jawapos dan Kompas yang menekankan masalah pada kecemasan akademika terhadap situasi pemilu yang mengkhawatirkan. Kesamaan ini terjadi karena ketiganya sama-sama mengutip pernyataan sikap universitas jember. Untuk Moral Judgment Detik menekankan moralitas umum mengenai pemilu , berjalan sesuai koridor dan jujur adil, sedangkan moralitas Kompas dan Jawapos disisi lain menekankan tanggung jawab kekuasaan dalam menjalankan pemilu. Sedangkan rekomendasi, Detik tampaknya tidak menarik kesimpulan dan rekomendasi

terhadap peristiwa ini, sedangkan Kompas dan Jawapos disisi lain menekankan rekomendasi pada pengawalan oleh seluruh pihak terhadap kinerja pemerintahan berkuasa, termasuk meminta agar pemerintah menjaga netralitas saat pemilu. Lebih lengkap mengenai ini dapat dilihat pada tabel 3.

**Tabel 3. framing media terhadap pernyataan sikap Universitas Jember**

	DETIK (Mulyono 2024)	KOMPAS (Bagus Supriadi 2024)	JAWAPOS (Jawapos 2024)
<i>Define Problems</i>	Desakan kepada seluruh elemen yang terlibat dalam pemilu untuk menjaga dan menegakkan demokrasi	Bentuk kepedulian dan keprihatinan civitas akademika Universitas Jember terhadap proses penyelenggaraan Pemilu 2024 yang dianggap memprihatinkan	banyak peristiwa dan permasalahan yang mengkhawatirkan, mencemaskan dan menakutkan menjelang pemilu.
<i>Diagnose Causes</i>	Upaya membangun dinasti politik yang mengakibatkan Pemilu tidak berlangsung jujur dan adil	Adanya kepentingan tertentu untuk membangun dinasti politik	Pembusukan Hukum oleh kekuasaan telah mengancam demokrasi, utamanya presiden adalah pelopornya.
<i>Make Moral Judgment</i>	Pemilu tetap bersifat jujur, langsung adil, bebas, rahasia agar sesuai koridor demokrasi dan konstitusi	Pemilu harus berjalan tanpa intimidasi	cabang kekuasaan negara untuk tetap berpedoman pada Tap MPR nomor 6 tahun 2021, tentang etika kehidupan berbangsa dan menjalankan nilai-nilai Pancasila.
<i>Treatment Recommendation</i>	-	Mengawal jalannya Pemilu	Meminta kekuasaan termasuk presiden dan bawaslau menjaga netralitas dalam pemilu
<i>Frame</i>	Menjaga demokrasi dan konstitusi, agar terhindar dari politik dinasti	Bentuk keprihatinan atas politisasi pemilu oleh kekuasaan	Kegagalan pemerintah menjaga netralitas pemilu.

Sumber: Olahan Peneliti

### Pernyataan sikap Universitas Airlangga

Universitas Airlangga (Unair) termasuk dari komunitas akademisi yang menyuarakan sikapnya mengenai proses menuju pemilu 2024. Unair menekankan praktik pelaksanaan hukum di Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pemilu yang melibatkan Gibran Rakabuming Raka, anak presiden Joko Widodo, adalah bentuk dinasti politik yang mengguncang fondasi hukum dan demokrasi, keterlibatan kekuasaan dalam sengketa pemilu dikawatirkan Unair akan membuat dalil demokrasi kekuasaan ditangan rakyat akan kehilangan fondasinya.

Peristiwa ini kemudian diliput oleh tiga media, Detik, Kompas dan Jawapos, dengan bentuk bingkai yang sebagian besar sama bahwa problem pemilu adalah keterlibatan kekuasaan dalam pemilu 2024. Define Problem ketiga media sama bahwa masalah utama pemilu 2024 adalah keterlibatan kekuasaan dan pemerintah dalam pemilu 2024, Diagnosa Cause juga sama diantara ketiga media menekankan fasilitas negara dipakai oleh keluarga Jokowi untuk melancarkan posisi mereka di Pemilu 2024. Moral judgment ketiganya juga sama menekankan pada posisi mengembalikan kekuasaan di tangan rakyat dan presiden harus menurut pada konstitusi dan hukum menjalankan negara. Disisi lain Detik tidak memberikan rekomendasi, sedangkan Kompas dan Jawapos menekankan rekomendasi mereka agar rakyat mengawasi pemerintah dan memastikan bahwa pemilu berjalan sesuai hukum dan nilai demokrasi. Untuk lebih detail bisa dilihat pada tabel 4.

**Tabel 4. framing media terhadap pernyataan sikap Universitas Airlangga**

	DETIK (Widiyana 2024a)	KOMPAS (Andhi Dwi Setiawan 2024)	JAWAPOS (Aprianto 2024)
<i>Define Problems</i>	Mengkritisi Pemerintahan Joko Widodo	Pengancamannya atas segala bentuk praktik pelemahan demokrasi menjelang pemilu 2024.	Respon atas demokrasi jelang Pemilu 2024 yang dinilai mulai hancur
<i>Diagnose Causes</i>	penggunaan fasilitas negara maupun aparat negara, demi kepentingan politik partisan elektoral	Merawat etika demokrasi dari penyelewengan kekuasaan dan praktik pelanggaran politik kekeluargaan	praktik – praktik pelanggaran politik kekeluargaan
<i>Make Moral Judgment</i>	Presiden harus memberi teladan dengan tidak menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi	Universitas Airlangga merasa sebagai perguruan tinggi mereka wajib menjaga rasionalitas dan kritisisme untuk menegakkan keadilan, presiden dan aparaturnya harus menghormati kebebasan berbicara tiap warga karena negara indonesia milik bersama.	Kemerdekaan Indonesia di segala bidang adalah milik rakyat Indonesia
<i>Treatment Recommendation</i>	-	Memastikan pemilihan dilakukan secara jujur adil tanpa campur tangan politik dan melindungi kebebasan akademik dan hak-hak sipil warga negara.	Penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil dan rahasia
<i>Frame</i>	Sikap kritis terhadap Presiden Joko Widodo dalam pemanfaatan kekuasaan dan sumber daya negara untuk kepentingan pribadi	Kecaman pelanggaran politik kekeluargaan sebagai praktik pelemahan demokrasi	Respon atas praktik pelanggaran politik kekeluargaan jelang Pemilu 2024 oleh Presiden

Sumber: Olahan Peneliti

### Pernyataan sikap Universitas Negeri Surabaya

Universitas Negeri Surabaya (Unesa) juga adalah komunitas akademika yang mengutarakan sikapnya menjelang pemilu 2024. Sikap terhadap pemilu 2024, adalah bentuk keresahan komunitas akademik di lingkungan Unesa, karena melihat Pemilu 2024 penuh dengan praktik-praktik pemilu yang keluar dari koridor demokrasi. Untuk itu Unesa menganggap pernyataan sikapnya sebagai tugas komunitas akademik mengawal kelangsungan pemilu dan memastikannya berjalan dalam kepentingan rakyat. Unesa mengeluarkan enam sikap utama, yang secara umum mendorong semua komunitas masyarakat dan lembaga pemerintahan untuk taat hukum dan taat berdemokrasi.

Pernyataan sikap Unesa, diliput oleh beberapa media termasuk Detik, dan Kompas. Kompas dan Detik mbingkai peristiwa ini dengan Bingkai yang berbeda. Bingkai detik mengarahkan keresahan terhadap praktik-praktik pemilu secara umum, tidak meletakkan kesalahan pada pihak atau komunitas tertentu, dan memberi rekomendasi untuk komunitas akademik menggunakan moral forcenya untuk menjaga persatuan bangsa, disisi lain Kompas mengarahkan bingkai berita untuk menyalahkan pemerintah sebagai penyebab resahnya komunitas akademik (termasuk Unesa) terhadap jalannya pemilu 2024. Pemerintah yang seharusnya netral dalam pemilu dituding Kompas telah mengintervensi pemilu 2024. Bingkai ini bisa dicermati dari cara kedua media meletakkan komponen bingkai, define problem Detik berupa demorasi di NKRI dalam situasi tidak baik-baik sehingga perlu di jaga, Define proble Kompas mengaitkan masalah demokrasi dengan tanggung jawab komunitas akademik menjaga mencegah pemilu tidak netral. Penyebab masalah demokrasi di NKRI tidak baik-baik saja (Diagnose causes ) oleh Detik disebabkan oleh proses berjalannya pemilu yang tidak semestinya, sedangkan oleh Kompas, disebabkan oleh tidak



netralan pemerintah dalam proses berjalannya pemilu 2024. Moral Judgment yang digunakan detik menekankan pada rusaknya rakyat pada proses pemilu tidak jujur dan adil, sedangkan Kompas menekankan pada penegakan hukum dan nilai demokrasi pada pelaku kepentingan. Treatment recommendation yang diajukan detik adalah penekanan pada kebebasan akademik dalam mendorong moral force pada pemilu 2024, sedangkan Kompas menekankan pada semua pihak termasuk pemerintah sebagai penyebab tidak-netralan pemilu untuk bertanggung jawab memberi rasa aman, jujur dan adil. Selengkapnya lihat tabel 5.

**Tabel 5. framing media terhadap pernyataan sikap Universitas Negeri Surabaya**

	DETIK (Widiyana 2024b)	KOMPAS (Andhi Dwi Setiawan 2024)	JAWAPOS
<i>Define Problems</i>	Keutuhan NKRI perlu dijaga	Tanggung jawab moral dunia Pendidikan mencegah pemilu yang tidak netral.	
<i>Diagnose Causes</i>	Demokrasi tidak berjalan semestinya,	Kecurigaan pemerintah tidak netral, dan mengintervensi di pemilu 2024	
<i>Make Moral Judgment</i>	memecah persatuan dan kesatuan	Tetap pada koridor etik, aturan, demokrasi yang sehat	
<i>Treatment Recommendation</i>	Kebebasan akademik, sivitas akademika yang menjadi moral force.	Agar seluruh pihak yang terlibat untuk bertanggung jawab supaya bisa berlangsung dengan damai, aman, serta jujur dan adil	
<i>Frame</i>	Sikap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa	Menjaga Pemilu sesuai Koridor Etik dan Demokrasi Sehat	

Sumber : Olahan Peneliti

**Tabel 6. framing media terhadap pernyataan sikap Universitas Katoli Widya Mandala Surabaya (APTIK)**

	DETIK (Jumbadi 2024)	KOMPAS (Singgih Wiryono 2024)	JAWAPOS
<i>Define Problems</i>	Pentingnya Pemilu damai dan berlangsung luber jurdil	Presiden sebagai pemimpin negara harus taat kepada sumpah jabatan	
<i>Diagnose Causes</i>	rusaknya tatanan hukum dan demokrasi Indonesia jelang Pemilu 2024.	Praktik penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, korupsi dan nepotisme serta penegakan hukum yang menyimpang	
<i>Make Moral Judgment</i>	Praktik penyalahgunaan kekuasaan kolusi, korupsi, dan nepotisme serta penegakan hukum yang semakin menyimpang dari semangat reformasi dan konstitusi negara	mampu menjunjung tinggi etika dalam bekerja sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan	
<i>Treatment Recommendation</i>	Keterlibatan semua Perguruan Tinggi di Indonesia dalam pemantauan Pemilu 2024	Bersama menjaga Pemilu 2024 berkualitas, bermartabat, jujur dan adil	
<i>Frame</i>	Sikap menjaga Pemilu damai dan berlangsung luber jurdil	Seruan atas penyimpangan yang dilakukan Jokowi sebagai Kepala Negara	

Sumber : Olahan Peneliti



### **Pernyataan sikap Universitas Katolik Widya Mandala (bersama Aptik)**

Universitas katolik widya mandala bersama asosiasi perguruan tinggi katolik (Aptik) juga mengeluarkan pernyataan sikap mengenai pemilu 2024, dengan penekanan terhadap persoalan hukum pemilu dan penerapan demokrasi yang dianggap bermasalah pada pemilu 2024. Dengan rekomendasi utama adalah menyerukan komunitas akademik untuk bersama mengawal pemilu yang jujur, adil dan tanpa intervensi.

Pernyataan sikap ini diliput oleh berbagai media termasuk Detik dan Kompas. Oleh kedua media pernyataan sikap ini dibingkai secara berbeda dengan bingkai detik berfokus pada pemikiran umum mengenai demokrasi pemilu 2024 jujur dan adil, sedangkan bingkai Kompas berfokus pada intervensi pemerintah terhadap pemilu 2024, telah mengusik penegakan hukum, dan jalannya pemilu 2024, secara detail elemen pembingkai dapat diamati pada tabel 6 bingkai media pada sikap Universitas Katolik Widya Mandala bersama Aptik

### **PEMBAHASAN**

#### **Era baru media mengontrol demokrasi: etik, idealisme, dan ekonomi politik media dan pengaruhnya terhadap fungsi kontrol demokrasi media.**

Jurnalistik ada untuk menjaga demokrasi telah menjadi gagasan yang dipertukarkan oleh para pelaku media dan setiap individu jurnalis, hingga menjadi pedoman untuk melakukan kegiatan jurnalistik. Di negara-negara yang menganut system demokrasi termasuk Indonesia, gagasan ini tidak hanya ada dalam buku, namun telah diimplementasikan dalam praktik-praktik jurnalistik dan menjadi satu dengan sejarah perkembangan negara.

Banyak ahli yang menjelaskan bagaimana keterlibatan kegiatan jurnalistik dengan proses demokrasi, mulai dari memberikan banyak sudut pandang informasi yang membantu masyarakat menimbang sebuah proses demokrasi, hingga menjaga elit penguasa mengedalikan proses demokrasi (Wolfgang, Vos, and Kelling 2019; Wolfgang et al. 2021; Waisbord 2018). Hal ini juga terlihat dalam proses politik di Indonesia, Dari jaman memperjuangkan kemerdekaan, orde baru, reformasi, hingga jaman mempertahankan demokrasi (saat ini) gagasan jurnalistik sebagai pilar penjaga demokrasi telah membantu transformasi dan transisi pemerintahan. Jurnalistik telah menghubungkan aktor penggerak dengan masyarakatnya, pemerintah dengan rakyatnya, termasuk mendorong rakyat melawan tiraninya.

Banyak ahli telah menyebutkan saat sebuah peristiwa berhubungan dengan kepentingan rakyat maka Media dan jurnalis adalah sahabat sejati masyarakat. (Yamamoto 2011; Hallin 2005; Wolfgang et al. 2021; Wolfgang, Vos, and Kelling 2019; Waisbord 2018). Jurnalis tidak hanya menginformasikan peristiwa namun juga berada dipihak masyarakat mendorong agar peristiwa demokrasi harus menguntungkan rakyatnya, memastikan demokrasi berjalan sesuai dengan koridor, Dimana kepentingan rakyat menjadi yang utama. Namun gagasan idealis ini mendapat tantangan akhir-akhir ini, perubahan teknologi yang mendorong distribusi informasi secara massif dan tidak terkontrol telah menjadi tantangan yang rumit bagi kegiatan jurnalistik. Sosial media dan mikroblogging telah mendorong informasi harus diproduksi dan didistribusikan secara cepat, massif dan tanpa standar verifikasi yang mumpuni, sehingga acap kali informasi yang disebarakan punya potensi

sebagai informasi palsu.

Disisi lain karena faktor kerja profesional jurnalistik media, Dimana terdapat proses kerja jurnalis wartawan, hingga seleksi redaksi, membuat produk jurnalistik sering kali kalah cepat dibandingkan informasi yang tersebar di platform daring. Disisi lain mempercepat kerja jurnalistik untuk mengikuti perkembangan zaman, berarti juga beresiko menurunkan kualitas verifikasi media (kejadian yang sering terjadi di karya jurnalistik yang tebit di portal berita maupun sosial media). Hal ini menjadi tantangan yang rumit karena menguji bagaimana peran jurnalistik menjaga kebenaran informasi ditengah serangan informasi palsu.

Juarez Miro & Anderson (2024) menjelaskan bahwa distribusi informasi palsu di sosial media dan platform daring lainnya telah menjadi tantangan bagi kegiatan jurnalistik, karena tidak hanya merusak fondasi demokrasi, merusak ekosistem informasi, namun juga menurunkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap produk pers. Disatu sisi Jurnalistik harus terferivikasi, harus melalui proses-proses liputan dan standar etik, dan di satu sisi harus netral dari kegiatan kapital/ekonomi. Semua itu butuh proses manusia yang membuat prosesnya menjadi lebih lamban dibandingkan yang lain.

Disisi lain kegiatan jurnalistik mendapat tantangan karena masyarakat lebih bergantung kepada sosial media untuk memperoleh informasi (Carter and Shields 2020; Beckerle, Finston, and Sussman 2020). Hal ini menjadi problematik, meskipun sosial media mampu menghadirkan informasi dalam detik, terdapat keraguan terhadap kebenaran informasi yang diterbitkan sosial media. Ini karena seringkali sosial media tidak menjalankan verifikasi informasi, tidak menjalankan standar etik distribusi informasi yang baik, seperti yang dilakukan oleh pers.

Namun sosial media sebagai sumber informasi lazim masyarakat moderen saat ini tidak lepas dari, distribusi cepat dan berbiaya murah bahkan gratis. Informasi yang disebarkan di sosial media kebanyakan bersifat voluntir karena dilakukan oleh audiens (citizen journalist) yang menyebarkan informasi dengan tendensi personal. Hal ini telah memaksa banyak Perusahaan media pers telah mengubah model bisnis mereka untuk bisa kompetitif di era disrupsi informasi ini. Perubahan model bisnis ini telah ditakuti akan memicu perubahan standar kualitas peliputan berita. Standar etik kerja individu wartawan, rutinitas kerja, pola kerja media dan extra media, hingga perubahan teknologi telah disinyalir mengubah jurnalis yang idealis dan otonom menjadi jurnalis yang bias.

Vos, Eichholz, and Karaliova (2019) telah melaporkan kekhawatiran ini dalam penelitian jurnalistik yang mereka kaji, merosotnya ekonomi jurnalistik dalam dekade terakhir akibat masifnya perubahan teknologi komunikasi dan informasi, telah memberi ketakutan kepada media dan jurnalis, karena godaan ekonomi, bisa memaksa terciptanya produk jurnalistik sensasional dan bias, untuk memenuhi "rasa haus dan selera" sensasional audiens. Kemunculan berita yang klik bait, berita yang ditulis sensasional, dan topik berita yang diliput hanya karena populer disosial media, membuat kerja jurnalis yang otonom, independent, dan bebas intervensi mulai terusik.

Apalagi berita di portal berita tidaklah sama dengan berita Panjang yang dulu di tulis di media-media konvensional, berita di portal media dan sosial media cenderung lebih ringkas, lebih cepat, sehingga tidak menutup kemungkinan standar jurnalistik tidak diterapkan semestinya dalam penulisannya. Ahli jurnalistik telah meragukan idealisme, akurasi, kredibilitas berita, akibat kerja jurnalis yang dituntut cepat untuk memproduksi dan menyebarkan berita di kanal online (Pratiwi and Ambardi 2020; Emeraldien, Sugihartati, and

Rahayu 2021).

Apalagi persaingan media jurnalistik portal dan media jurnalistik sosial media jauh lebih ketat dari yang dibayangkan, data Asosiasi media Cyber, dewan pers, dan menkominfo menyebutkan pada tahun 2024 kurang lebih terdapat 40-50 ribu portal yang menyatakan dirinya sebagai portal berita, dan sekitar 1000+ yang tercatat di dewan pers (Dewan Pers and UMN 2024; Haryanto and AMSI 2021). Hal ini memicu persaingan usaha jurnalistik secara ekonomi menantang. Beberapa ahli bahkan menyebutkan bahwa kekhawatiran mereka tentang runtuhnya garis api antara kerja redaksional berita dan ekonomi media dalam proses pembuatan berita (Widyanningtyas 2022). Berita yang mengincar judul fantastis demi klik bait, berita yang tidak menjalankan verifikasi narasumber karena ingin diterbitkan lebih awal, dan ketergantungan media terhadap “model revisi berita” yang dimungkinkan karena perkembangan teknologi. Memicu kualitas jurnalistik dianggap menurun dalam dekade terakhir. Menurunnya kualitas jurnalistik ini pada akhirnya ditakutkan akan mempengaruhi performa karya jurnalistik sebagai pilar demokrasi, karena melemahnya sifat otonom, independen, dan bebas intervensi dari jurnalis dan media.

Tidak hanya persoalan ekonomi, tantangan lain kegiatan jurnalistik di Indonesia muncul karena konglomerasi dan kepemilikan media. Kesadaran elit akan pentingnya kegiatan jurnalistik dalam mempengaruhi persepsi masyarakat, telah mendorong konglomerasi media oleh para aktor politik. Sebagian media-media yang punya nama telah dicurigai oleh banyak ahli memuat kepentingan politik pemilik media.

Beberapa media jurnalistik baik yang konvensional maupun yang digital internet dimiliki oleh mereka yang terlibat secara aktif dalam perpolitikan Indonesia (Pembayun 2015; Hawa Shofurani 2024; Hariyadi 2018). Beberapa elit partai politik memiliki media massa sebut saja Surya Paloh, Hary Tanoë Soedibjo, Eric Tohir, Aburizal Bakrie, dalah beberapa konlomerat dan politisi yang punya media brand besar yang ada di Indonesia. Peristiwa politik pada Pilpres 2014 dan 2019 telah menjadi Sejarah dan kisah bagaimana media massa yang tujuannya adalah melindungi kepentingan rakyat digunakan untuk mendukung elit politik dalam pemilu.

Dengan menimbang kembali berbagai perspektif jurnalistik yang telah disebutkan di atas, maka pertanyaan yang mengemuka apakah media massa saat ini masih menjalankan fungsi kontrol sosial?. Bagaimana konlomerasi, perkembangan teknologi, politik dan ekonomi media membawa media menjalankan peran dan fungsinya menjaga demokrasi menjadi hal yang perlu didiskusikan secara serius.

Peristiwa demokrasi di Indonesia pada tahun 2024 mungkin menjadi sampel yang bagus untuk melihat bagaimana kinerja media di Indonesia dalam peranannya menjadi kontrol terhadap demokrasi. Secara spesifik peristiwa kelompok civitas akademika menyampaikan kegelisahan mereka mengenai praktik-praktik demokrasi, dan bagaimana media meliput hal tersebut bisa menjadi kunci untuk mengamati peranan media saat ini. Penelitian ini mengamati bagaimana beberapa media massa memberitakan pernyataan Civitas Akademika di Jawa Timur dan membedahnya dengan perangkat Framing Entman, untuk mendapat data bagaimana media mengambil perspektif terhadap peristiwa tersebut. Hasil pengelompokan data dengan model Entman, menghasilkan beberapa pola dalam kerja media memberitakan peristiwa Pernyataan Civitas Akademika Jawa Timur. Pola pertama adalah “media tidak berpihak” media melaporkan peristiwa sesuai dengan temuan jurnalis dilapangan, komponen pembingkai disusun agar fokus pada peristiwa Pernyataan Civitas

Akademika. Kausalitas peristiwa dikembalikan kepada pemikiran umum.

Dalam hal ini media seperti Detik.com yang semua komponen pembingkai (Define Problems, Diagnose Causes, Make Moral Judgement, Treatment Recommendation) pada beberapa pernyataan sikap Civitas Akademika Jawa Timur, tidak konsisten. Secara rinci peristiwa Pernyataan Sikap Civitas Akademika Jawa Timur yang dilaporkan detik menghasilkan pertama bingkai umum bahwa politik dinasti punya dampak serius terhadap demokrasi (Universitas 17 Agustus) , yang kedua bingkai bahwa Jokowi yang menjalankan politik kekeluargaan sebagai penyebab kegagalan Demokrasi (Universitas Jember, Universitas Airlangga), namun dua peristiwa terakhir dibingkai secara umum bahwa problem demokrasi adalah ketidak jujuran dan politik perlu dijalankan secara damai, tanpa meletakkan problem pada pemerintah berkuasa saat ini (Universitas Negeri Surabaya, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya).

Dengan membaca bingkai secara menyeluruh Peristiwa Pernyataan Sikap Civitas Akademika yang dilaporkan Detik, Detik tampaknya tidak menghubungkan antara ke lima peristiwa dan melaporkannya secara terpisah, hasil pembingkai yang dilakukan detik termasuk bagaimana peletakan pemerintah atau tidak meletakkan pemerintah sebagai penyebab problem demokrasi di Pemilu 2024, sesuai dengan pernyataan sikap yang dilangsungkan oleh masing-masing Kampus. Universitas Jember dan Universitas Airlangga yang dalam pernyataan sikapnya menyalahkan pemerintah sebagai penyebab problem demokrasi di pemilu 2024, termasuk menyampaikan istilah dinasti politik, dikutip dan dijadikan materi berita oleh detik yang kemudian melahirkan bingkai Politik Dinasti. disisi lain dua pernyataan kampus (universitas negeri Surabaya dan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya) yang menekankan pemilu damai dan tanpa menargetkan langsung pemerintah berkuasa secara langsung, juga dilaporkan serupa oleh detik, hasilnya adalah bingkai berita pemilu damai tanpa menempatkan pemerintah berkuasa sebagai penyebab permasalahan demokrasi di pemilu 2024.

Pola kedua adalah “media berpihak,” media melaporkan peristiwa Pernyataan Civitas Akademika Jawa Timur, dengan memberi penekanan pada pokok-pokok peristiwa sehingga memunculkan kesan pengaruh dan dampak. Dalam hal ini media Seperti Kompas, yang semua komponen pembingkai (Define Problems, Diagnose Causes, Make Moral Judgement, Treatment Recommendation) menitik beratkan pada “dinasti politik” sebuah kode keberpihakan karena meletakkan pemerintah sebagai pihak yang melanggar proses demokrasi dan membela peristiwa pernyataan Civitas Akademika Jawa Timur, sebagai proses melawan ketidak-adilan dalam proses demokrasi. Konsistensi ini dapat dicermati dari cara bagaimana Kompas membangun bingkai pada 5 peristiwa pernyataan sikap Civitas Akademika Jawa Timur, yang semuanya menekankan kesalahan pemerintah dalam membangun politik dinasti, yang kemudian menciptakan kegagalan dalam menjalankan demokrasi.

Jawapos berdasarkan hasil analisis data dengan metode Framing Entman juga menampilkan hasil yang serupa dengan media Kompas. Berdasarkan hasil menganalisis 4 komponen pembingkai Entman pada berita Jawapos mengenai peristiwa pernyataan sikap Civitas Akademika Jawa Timur, ditemukan bahwa Jawapos menempatkan pemerintah berkuasa saat ini sebagai penyebab utama problematika demokrasi yang ada di Indonesia. Meskipun berbeda dengan Kompas yang meliputi 5 peristiwa Pernyataan sikap Civitas Akademika di Jawa Timur, Jawapos hanya meliputi dua kasus, yakni Pernyataan sikap Civitas Akademika di Jawa Timur yang dilakukan oleh Kampus di Jember dan Pernyataan sikap

Civitas Akademika di Jawa Timur oleh Universitas Airlangga Surabaya.

Hasil analisis bingkai ketiga media terhadap peristiwa pernyataan sikap Civitas Akademika Jawa Timur, juga melahirkan beberapa perspektif temuan. Meskipun ketiga media mengambil sudut pandang berbeda mengenai pihak mana yang harus bertanggung jawab terhadap problem Pemilu 2024. Dimana Jawa Pos mencoba mengambil posisi bahwa semua partisan harus bertanggung jawab menghadirkan pemilu Jujur dan adil (Jurdil), sedangkan Kompas dan Jawapos menempatkan pemerintah pusat sebagai pihak yang perlu bertanggung jawab terhadap masalah pemilu 2024.

Hal yang sama dari ketiga media adalah peranan mereka untuk memastikan Pemilu 2024 dijalankan secara Jurdil. Hasil ini sekaaligus menjawab pertanyaan apakah media masih menjaga dirinya sebagai pilar demokrasi, atau agen kontrol sosial ?, dan jawabannya adalah media yang secara umum tunduk dalam sistem aturan dan organisasi jurnalistik masih menjalankan perannya sebagai alat kontrol terhadap proses demokrasi. Ketiga sample media yang dipakai untuk analisis ini menunjukkan konsistensi menjaga demokrasi dalam lima peristiwa pernyataan sikap Civitas Akademika Jawa Timur yang mereka beritakan. Ketiga media sama-sama menekankan pentingnya pemilu yang jujur dan adil di Pemilu 2024. Namun, mencermati hasil analisa pembeding ketiga media yang berbeda mengenai bagaimana problem demokrasi terjadi di pemilu 2024, Dimana Detik menyesuaikan sumber berita, sedangkan Kompas dan Jawapos membangun komponen pembeding untuk meletakkan tanggung jawab terhadap pemerintah pusat. Bisa dikatakan terdapat faktor lain yang mempengaruhi cara media menjalankan prinsip kontrol sosial.

Menganalisis lebih jauh mengenai hal tersebut membutuhkan metode pengumpulan dan analisis data yang lain, yang belum bisa disediakan dalam penelitian ini, Oleh Shoemaker dan Reese ada lima komponen yang perlu diperhatikan ketika ingin menggali bagaimana cara manajemen media bekerja dalam memberitakan peristiwa, kelima adalah data pola kerja individu wartawan, data rutinitas kerja dan hubungan antara individu, data tata Kelola media, data hubungan media dengan organisasi lain diluar media, dan data hubungan media dengan ideologi komunitas masyarakat Dimana media tersebut tinggal (Shoemaker and Reese 2013; Salaudeen 2021). Penelitian ini sendiri hanya mengelola data bingkai berita sehingga terdapat kesulitan dalam menarik Kesimpulan mengenai faktor lain yang membuat media seperti Kompas, Jawapos, berada disisi menyalahkan pemerintah, sedangkan Detik mengambil posisi “apa adanya”, memberitakan sesuai dengan hasil yang mereka dapatkan dari reportase di lapangan.

Meskipun demikian, dengan pertimbangan akademikal dan studi iteratur pengalaman kerja media dalam proses demokrasi Indonesia dalam dekade terakhir. Dimana salah satunya adalah menampilkan pengaruh ekonomi-politik media dalam proses kontrol demokrasi dan keberpihakan media pada peristiwa demokrasi. Bisa ditarik asumsi akademis bahwa perbedaan ketiga media dalam mbingkai peristiwa pernyataan sikap Civitas Akademika, dipengaruhi oleh faktor ekonomi-politik media masing-masing.

Mengelaborasi temuan-temuan di atas, bagaimana media menjaga perannya sebagai alat kontrol demokrasi sangat dipengaruhi oleh peristiwa politik dan bagaimana ekonomi politik media bekerja dalam ruang diskusi antara kepentingan rakyat sebagai tuan demokrasi dan kepentingan politik ekonomi media yang menghidupi media dalam gejolak perubahan jaman.

## **SIMPULAN**

Hasil pembedaan dan diskusi kajian terhadap peristiwa pernyataan sikap Civitas Akademika Jawa Timur, telah memberi gambaran bagaimana kerja kontrol media terhadap proses demokrasi di era baru jurnalistik. Meskipun muncul tantangan perubahan teknologi, disrupsi informasi, hingga perubahan pada ekonomi politik media. Media tetap menjaga “marwahnya” sebagai alat kontrol sosial bagi demokrasi. Hasil bingkai ketiga media terhadap peristiwa, menunjukkan bagaimana “sisi keberpihakan kepada rakyat” masing-masing media. Hal ini diperlihatkan melalui bingkai ketiga media yang memastikan Pemilu 2024 harus dijalankan dengan proses demokrasi yang jujur dan adil tanpa intervensi. Namun cara baca kontrol sosial modern tidak bisa dibaca apa-adanya. Karena konstruksi pembedaan pemilu 2024 jujur dan adil, sangat dipengaruhi bagaimana faktor ekonomi-politik media melakukan “twist/pembengkokan” pada proses kontrol sosial tersebut. Singkatnya kontrol sosial terhadap demokrasi masing-masing media akan sangat berbeda bergantung bagaimana peristiwa tersebut berkaitan langsung dengan praktik ekonomi-politik masing-masing media. Hasil bahwa detik punya kecenderungan membingkai apa adanya momen kontrol sosialnya, sedangkan Kompas dan Jawapos meletakkan pemerintah pusat sebagai penanggung jawab utama guncangan demokrasi Pemilu 2024, adalah hasil dari bagaimana politi-ekonomi media bekerja.

## **REFERENSI**

- Andhi Dwi Setiawan, Pythag Kurniati. 2024. “Deklarasi Guru Besar Unesa, Ingin Pemilu Tetap Pada Koridor Etik Dan Demokrasi Sehat.” 2024.
- Aprianto, Dimas Nur. 2024. “Aksi Unair Memanggil, Tujuh Guru Besar Turun Gunung Di Surabaya.” 2024.
- Bagus Supriadi, Pythag Kurniati. 2024. “Guru Besar Unej Minta Jokowi Hentikan Politisasi Kebijakan Yang Bisa Merusak Demokrasi.” 2024.
- Beckerle, Hana, Rachel Finston, and Benjamin Sussman. 2020. “Social Media Debate Position 1: Against the Use of Social Media as a Credible Source of Information.” *Internet Reference Services Quarterly* 25 (1–2): 25–35. <https://doi.org/10.1080/10875301.2021.1937438>.
- Carter, Janae, and Benjamin Shields. 2020. “Social Media Debate Position 3: Social Media as a Credible Source of Information.” *Internet Reference Services Quarterly* 25 (1–2): 49–54. <https://doi.org/10.1080/10875301.2021.1940411>.
- CIPG. 2015. “Tentang Media Dan Demokrasi.” Cpg 4: 52.
- Devi, Aprilia. 2024. “Sivitas Akademika Untag Surabaya Nyatakan Sikap Tolak Politik Dinasti.” 2024.
- Dewan Pers, and UMN. 2024. “LANSKAP MEDIA PERS Di INDONESIA Dasar Pemikiran,” no. June: 1–8.
- Emeraldien, Fikry Zahria, Rahma Sugihartati, and Titik Puji Rahayu. 2021. “Inaccuracy within Online Journalism in Indonesia.” *Jurnal The Messenger* 13 (2): 179. <https://doi.org/10.26623/themessenger.v13i2.1011>.
- Eriyanto. 2013. *Analisis Framing*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gupta, Bahana Patria. 2024. “Pernyataan Sikap Akademisi Di Surabaya Terkait Kontestasi Pemilu.” 2024.
- Hallin, Daniel C. 2005. *We Keep America on Top of the World*. New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203977477>.



- Hariyadi, Taufan. 2018. "Runtuhnya Pilar Demokrasi, Politik Kuasa Media Partai Perindo Di MNC Grup." In DiMCC Conference Proceeding, 1:110–30.
- Haryanto, Ignatius, and AMSI. 2021. "Survey on Cyber Media Condition in Indonesia." Indonesia Digital Media Landscape Report.
- Hawa Shofurani. 2024. "Demokrasi, Governance, Dan Oligarki: Konglomerasi Media MNC Group Keterlibatannya Melancarkan Capres Ganjar Pranowo Pada Pemilu 2024." *Politeia: Jurnal Ilmu Politik* 16 (2): 108–16. <https://doi.org/10.32734/politeia.v16i2.14537>.
- Hutomo, Cahyo. 2023. "Optimalisasi Peran Media Dalam Pemberitaan Pemilu Guna Meningkatkan Kualitas Demokrasi." LEMHANNAS RI. Vol. 13.
- Jawapos. 2024. "Jelang Pemilu 2024, Civitas Akademika Universitas Jember Keluarkan Pernyataan Sikap, Berikut Isinya." *Jawapos.Com*, 2024. <https://radarjember.jawapos.com/pendidikan/794087465/jelang-pemilu-2024-civitas-akademika-universitas-jember-keluarkan-pernyataan-sikap-berikut-isinya>.
- Juarez Miro, Clara, and Jonathan Anderson. 2024. "Correcting False Information: Journalistic Coverage During the 2016 and 2020 US Elections." *Journalism Studies* 25 (2): 218–36. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2023.2293830>.
- Jumbadi, Serly Putri. 2024. "Jelang Pemilu, Rektor-Ketua Kampus Katolik Dorong Pemerintah Junjung Etika." 2024.
- Lestari, Puji, and Suranto Suranto. 2018. "Media Online Sebagai Pilar Kelima Demokrasi (Analisis Wacana Pada Petisi Online Terpopuler Periode Januari – Desember 2017 Di Change.Org)." *Lektur: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1 (1). <https://doi.org/10.21831/lektur.v1i1.12625>.
- Mulyono, Yakub. 2024. "Ratusan Mahasiswa-Dosen Unej Nyatakan Sikap: Politik Dinasti Cederai Pemilu." 2024.
- Pembayun, Jaduk Gilang. 2015. "Konglomerasi Media Dan Dampaknya Pada Pilpres 2014." *Jurnal Interaksi* 4 (2): 109–16.
- Prasetyo, Stanley Adi, Yadi Hendriana, Tri Agung Kristanto, Bestian Nainggolan, A Sapto Anggoro, Wahyu Dhyatimika, Lintang Ratri Rahmiadji, and Winarto. 2023. "Pers Di Tahun Politik" 25: 10–17.
- Pratiwi, Ellya, and Kuskridho Ambardi. 2020. "Performa Jurnalisme Online Dan Kecenderungan Politainment Dalam Berita Pilpres 2019." *Jurnal Studi Jurnalistik* 2 (1): 25–44. <https://doi.org/10.15408/jsj.v1i2.14601>.
- Rusli, I, S Ahdan, and M Idris. 2022. "Analisis Framing Konstruksi Pemberitaan Presiden Jokowi Terkait Persiapan Pemilu 2024 Di Media Kompas. Com Dan Republika. Co. Id." *Respon Jurnal Ilmiah ...*, 160–68.
- Salaudeen, Mistura Adebusola. 2021. "From Personal to Professional: Exploring the Influences on Journalists' Evaluation of Citizen Journalism Credibility." *Journalism Practice* 0 (0): 1–24. <https://doi.org/10.1080/17512786.2021.1892517>.
- Shoemaker, Pamela J., and Stephen D. Reese. 2013. *Mediating the Message in the 21st Century: A Media Sociology Perspective*. 3rd ed. New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203930434>.
- Singgih Wiryono, Ihsanuddin. 2024. "Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Minta Jokowi Junjung Tinggi Etika." 2024.
- Slamet, Adiyana. 2016. "Media Dan Masa Depan Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Politik*

- Dan Komunikasi 6 (1): 121–121.
- Sumarkidjo, Atmadji. 2013. "Pers Nasional, Pilar Satu-Satunya Yang Konsisten Anti-Korupsi." *Jurnal Visi Komunikasi* 12 (1): 65–81.
- Vicki Febrianto. 2023. "Pengamat Sebut Jawa Timur Barometer Penentu Pemilu 2024," 2023.
- Vos, Tim P., Martin Eichholz, and Tatsiana Karaliova. 2019. "Audiences and Journalistic Capital: Roles of Journalism." *Journalism Studies* 20 (7): 1009–27. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2018.1477551>.
- Waisbord, Silvio. 2018. "Truth Is What Happens to News: On Journalism, Fake News, and Post-Truth." *Journalism Studies* 19 (13): 1866–78. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2018.1492881>.
- Wardani, Ayu, Dede Suprayitno, and Ratu Nadya Wahyuningratna. 2023. "Framing Pemberitaan Calon Presiden Pada Media Online CNNIndonesia.Com Dan Kompas.Com." *Jurnal PIKMA : Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema* 6 (1): 54–79. <https://doi.org/10.24076/pikma.v6i1.1181>.
- Wibawa, Darajat. 2020. "Wartawan Dan Netralitas Media." *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4 (2): 185–206. <https://doi.org/10.15575/cjik.v4i2.10531>.
- Widiyana, Esti. 2024a. "120 Sivitas Akademika Unair Kritik Keras Pemerintahan Jokowi." 2024.
- . 2024b. "Sivitas Akademika Unesa Sampaikan 6 Poin Sikap Respons Dinamika Politik." 2024.
- Widyanningtyas, Mia Dwianna. 2022. "Idealisme Wartawan Dalam Pusaran Bisnis Media: Runtuhnya Dinding Api." *Idealisme Jurnalis & Inovasi Model Bisnis Industri Media*, no. July: 165–76. <https://doi.org/10.37535/20320220111>.
- Wolfgang, J. David, Tim P. Vos, and Kimberly Kelling. 2019. "Journalism's Relationship to Democracy: Roles, Attitudes, and Practices." *Journalism Studies* 20 (14): 1977–94. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2018.1547123>.
- Wolfgang, J. David, Tim P. Vos, Kimberly Kelling, and Sooyoung Shin. 2021. "Political Journalism and Democracy: How Journalists Reflect Political Viewpoint Diversity in Their Reporting." *Journalism Studies* 22 (10): 1339–57. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2021.1952473>.
- Yamamoto, Masahiro. 2011. "Mass Media as a Macrolevel Source of Social Control: A New Direction in the Community Structure Model." *Mass Communication and Society* 14 (6): 820–37. <https://doi.org/10.1080/15205436.2011.608178>.